

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 77 TAHUN 2020 SERI E**

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TENGAHTANI  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tengahtani Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);



14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknik Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknik Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknik Daerah Puskesmas Tengahtani, yang selanjutnya disebut Puskesmas Tengahtani adalah UPTD Puskesmas Tengahtani.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemeritahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas nonrawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat dan pelayanan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.
17. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menvelenggarakan rawat inap

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## BAB III TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Bagian Kesatu Tugas Puskesmas

#### Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

### Bagian Kedua Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

#### Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Tengahtani, meliputi:

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

#### Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;



- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan kefarmasian; dan
- h. pelayanan laboratorium.

#### Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko tertular virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
- m. pelayanan imunisasi;
- n. pelayanan penyakit menular lainnya (kusta, DBD, ISPA, diare, dll);
- o. pelayanan promosi kesehatan;
- p. pelayanan kesehatan lingkungan;
- q. pelayanan gizi;
- r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- s. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- t. pelayanan kesehatan kerja;
- u. pelayanan kesehatan olahraga;
- v. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- w. pelayanan kesehatan indera; dan
- x. pelayanan kesehatan pengembangan lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Tengahtani, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PENERAPAN

##### Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada

- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

##### Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - g. pelaksanaan anggaran; dan
  - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

### Bagian Kedua

#### Pengawasan

##### Pasal 11



- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 5 Oktober 2020

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 77 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 74 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEH  
MASYARAKAT TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANG PADA PUSKESMAS TENGAHTANI**

[illegible]





	Pelayanan MTBS	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Bid. koordi
4	Pelayanan gawat darurat	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GLS) yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	Dok
	Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa		100%	100%	100%	100%	100%	Dok
	Kelengkapan inform consent sebelum Tindakan medis		100%	100%	100%	100%	100%	Dok
5	Pelayanan gizi yang bersifat UKP	Pelayanan konseling	100%	100%	100%	100%	100%	Petuge
	Pelayanan SDIDTK		5%	5%	5%	5%	5%	Petuge
6	Pelayanan kefarmasian	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%	Apot



	Tidak adanya kejadian tertukar spesimen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ana
	Kelengkapan pemeriksaan laboratorium	100%	43,75%	50%	80%	100%	100%	100%	Ana

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**RAHMAT SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR**

**SERI E**



	Tidak kejadiannya spesimen	adanya tertukar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ana
	Kelengkapan pemeriksaan laboratorium		100%	43,75%	50%	80%	100%	100%	100%	Ana

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR

SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON.

NOMOR : 74 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA UPTD PUSKESMAS TENGAHTANI**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	PENCAPAIAN AWAL	RENCANA PENCAPAIAN TAHUN						PENANG GUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	95,09%	99,05%	99%	100%	100%	100%	PJ UKM	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	99,80%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UJKM	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	103,72%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	

4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	94,16%	99,6%	99,9%	100%	100%	100%	PJ UKM
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	0%	40%	60%	80%	90%	100%	PJ UKM
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	0%	40%	60%	80%	90%	100%	PJ UKM

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	5%	30%	50%	60%	80%	100%	PJ UKM
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	20%	80%	90%	100%	100%	100%	PJ UKM
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	64%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM



[illegible]

DBD, Ispa, Diare, Filariasis)	c. Cakupan penemuan penderita pneumonia balita	100 %	111 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
	d. Cakupan penemuan penderita diare	100 %	59,73 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
	e. Cakupan tatalaksana kasus Filariasis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
	Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga	100%	98 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	PJ UKM
	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase penduduk terhadap pengawasan rumah sehat	85%	42,54 %	45 %	50 %	60 %	70 %	85 %	PJ UKM	
17. Pelayanan Gizi	a. ASI Eksklusif	100%	88,63 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
	b. Remaja putri TTD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
	c. Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
18. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	a. Kunjungan rawat jalan umum mendapat askep individu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	
	b. Cakupan keluarga mandiri III dan IV	100 %	53,60 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %	PJ UKM	



24.	Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya (Surveilans)	a. Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM
		b. Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM

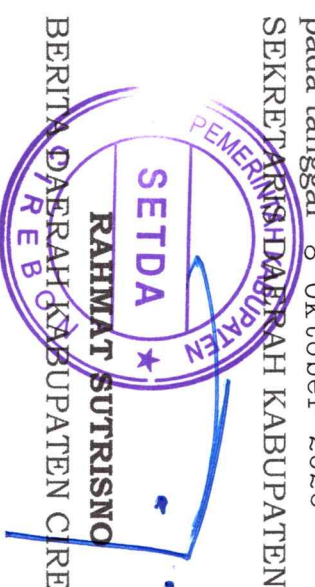
**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



SERI E



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 74 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT TENGAHTANI  
KABUPATEN CIREBON

**A. INDIKATOR SPM UKP**

**1. Pelayanan Pemeriksaan Umum**

Judul	<b>Waktu tunggu pendaftaran &lt; 5 menit</b>
Dimensi Mutu	Kualitas dan keamanan
Tujuan	Teregistrasinya pasien sesuai dengan substandar waktu yang ditetapkan (cepat, tepat dan akurat)
Definisi Operasional	Lama waktu pendaftaran adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari pasien diidentifikasi sampai sesuai dengan standar SIK
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah rata-rata yang dibutuhkan untuk registrasi sesuai standar SIK dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah kunjungan yang teregistrasi dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi kunjungan
Target	< 5 menit
Langkah Kegiatan	Persiapan sarana dan prasarana, pengaturan tenaga dan sampling survei
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Koordinator SP2TP

Judul	<b>Kelengkapan <i>informed concent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya tanggung jawab rekam medis untuk memberikan informasi kepada pasien dan mendapatkan informasi dari pasien
Definisi Operasional	<i>Informed concent</i> adalah persetujuan yang diberikan kepada pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan lengkap mengenai rekam medis pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Nominator	Jumlah pasien yang di data
Denominator	Jumlah pasien yang mendapat rekam medis yang di survei dalam 1 bulan
Sumber Data	Survei
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Petugas Rekam Medis

Judul	<b>Pelayanan pemeriksaan umum</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan rawat jalan oleh tenaga yang kompeten
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan rawat jalan adalah dokter dan tenaga perawat yang kompeten (minimal D3)
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan
Periode Analisa	6 bulan
Nominator	Jumlah tenaga dokter dan perawat yang memberikan pelayanan di ruang rawat jalan yang sesuai dengan ketentuan
Denominator	Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang bertugas di rawat jalan
Sumber Data	Kepegawaian

Target	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Penanggung jawab Rawat Jalan

Judul	<b>Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan</b>
Dimensi Mutu	Efektivitas, kenyamanan dan efisiensi
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan pendaftaran rawat jalan
Definisi Operasional	Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen rekam medis mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan/ditemukan oleh petugas
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap 3 bulan
Nominator	Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis sampel rawat jalan yang diamati
Denominator	Total sampel penyediaan rekam medis yang diamati (N tidak kurang dari 50)
Sumber Data	Hasil survei pengamatan di ruang pendaftaran rawat jalan untuk pasien baru/di ruang rekam medis untuk pasien lama
Standar	$\leq 10$ menit
Penanggung jawab pengumpulan data	Petugas Rekam Medis

Judul	<b>Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua Pasien dengan penyakit PTM yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP



Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit PTM yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Nominator	Jumlah pasien yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua lansia secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program PTM
Target	20% jumlah pasien yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Programer PTM/simpus

Judul	<b>Pelayanan Pemeriksaan Lansia</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada lansia yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Nominator	Jumlah lansia yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua lansia secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu



Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program Lansia
Target	20% lansia yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Programer Lansia/simpus

## 2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Judul	<b>Pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Setiap pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan gigi yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan gigi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah pasien yang dilayani oleh petugas setiap hari
Denominator	Jumlah semua pasien yang dilayani petugas secara kumulatif dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Laporan harian dan laporan bulanan
Target	4 % pasien yang datang dapat dilayani dengan baik
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Dokter gigi/perawat gigi

## 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP

Judul	<b>Pelayanan KIA</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua PUS, Bumil, Bulin dan Bufas yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada PUS, Bumil, Bulin dan Bufas yang membutuhkan

	pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Nominator	Jumlah PUS, Bumil, Bulin dan Bufas yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua PUS, Bumil, Bulin dan Bufas secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program KIA
Target	100% lansia yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Programer KIA/simpus

Judul	<b>Pelayanan KB</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua PUS yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada PUS yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Nominator	Jumlah PUS yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua lansia secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program KIA
Target	100% lansia yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani

Judul	<b>Pelayanan imunisasi</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas serta taat SOP
Tujuan	Semua sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik dan sesuai SOP
Definisi Operasional	Pemberian imunisasi kepada semua sasaran imunisasi (bayi) agar mendapatkan kekebalan tubuh kepada beberapa penyakit PD3I
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan, triwulan dan tahunan
Nominator	Jumlah sasaran yang mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan
Denominator	Jumlah kumulatif semua sasaran yang mendapatkan imunisasi dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Laporan kegiatan bulanan petugas imunisasi
Target	97.5 %
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Koordinator Imunisasi
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Programer KIA/simpus

Judul	<b>Pelayanan MTBS</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua pasien bayi, balita yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi, balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan



Periode Analisa	Tiap bulan
Nominator	Jumlah bayi, balita yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua bayi, balita secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program MTBS
Target	100% bayi, balita yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Programer MTBS/Simpus

#### 4. Pelayanan Gawat Darurat

Judul	<b>Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan gawat darurat oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidang kegawatdaruratan
Definisi Operasional	Tenaga kesehatan yang berkompeten pada gawat darurat adalah tenaga yang sudah memiliki sertifikat pelatihan ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah tenaga yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS
Denominator	Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan
Sumber Data	Kepegawaian
Target	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Ka TU Puskesmas



Judul	<b>Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam memberikan pelayanan gawat darurat
Definisi Operasional	<i>Life Saving</i> adalah upaya penyelamatan jiwa manusia dengan urutan <i>Airway, Breath, Circulation</i>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah kumulatif pasien yang mendapat pertolongan <i>life saving</i> di pelayanan gawat darurat
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang membutuhkan penanganan <i>life saving</i> di pelayanan gawat darurat
Sumber Data	Rekam medis di pelayanan gawat darurat
Target	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Penanggung jawab Ruang Tindakan

Judul	<b>Kelengkapan <i>informed consent</i> sebelum tindakan medis</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya tanggung jawab dokter untuk memberikan informasi kepada pasien dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan medis yang akan dilakukan
Definisi Operasional	<i>Informed concent</i> adalah persetujuan yang diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien tersebut
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Nominator	Jumlah pasien yang mendapat tindakan medis yang disurvei yang mendapatkan informasi lengkap

	sebelum memberikan persetujuan tindakan medis dalam 1 bulan
Denominator	Jumlah pasien yang mendapat tindakan medis yang disurvei dalam 1 bulan
Sumber Data	Survei
Target	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Dokter Ruang Tindakan

### 5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP

Judul	<b>Pelayanan konseling</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua pasien yang membutuhkan layanan kesehatan konseling dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan konseling kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Nominator	Jumlah pasien yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua Pasien secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program Promkes
Target	5% Pasien yang datang membutuhkan layanan konseling kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Programer Promkes/simpus

Judul	<b>Pelayanan SDIDTK</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua bayi, balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan tumbuh kembang yang dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi, balita yang membutuhkan pelayanan tumbuh kembang agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Nominator	Jumlah bayi balita yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua bayi, balita secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program Gizi
Target	2% bayi, balita yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Programer Gizi/simpus

## 6. Pelayanan Kefarmasian

Judul	<b>Penulisan resep sesuai formularium</b>
Dimensi Mutu	Efisiensi
Tujuan	Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien
Definisi Operasional	Formularium obat adalah daftar obat yang digunakan di Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Nominator	Jumlah resep yang diambil sebagai sampel yang sesuai formularium dalam satu bulan



Denominator	Jumlah seluruh resep yang diambil sebagai sampel dalam satu bulan (minimal 50)
Sumber Data	Survei
Target	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Apoteker

Judul	<b>Pemberi pelayanan farmasi</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan obat
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan obat adalah asisten apoteker yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	3 bulan sekali
Periode Analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah dan jenis tenaga yang ada di ruang obat
Denominator	Jumlah dan jenis seluruh tenaga yang ada di ruang obat
Sumber Data	Ruang obat
Standar	Tersedia tenaga Apoteker
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator Farmasi

Judul	<b>Ketersediaan Formularium</b>
Dimensi Mutu	Efisiensi
Tujuan	Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien
Definisi Operasional	Formularium obat adalah daftar obat yang digunakan di Puskesmas sesuai dengan Formularium Nasional
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan



Nominator	Formularium Puskesmas
Denominator	Formularium Nasional
Sumber Data	Survei
Standar	Tersedia dan update 3 tahun terakhir
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator Farmasi

Judul	<b>Tidak adanya kejadian salah pemberian obat</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya kejadian kesalahan dalam pemberian obat
Definisi Operasional	Kesalahan pemberian obat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salah dalam memberikan jenis obat</li> <li>2. Salah dalam memberikan dosis obat</li> <li>3. Salah orang</li> <li>4. Salah jumlah</li> </ol>
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Nominator	Jumlah seluruh pasien instalasi obat yang disurvei dikurangi dengan jumlah pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat
Denominator	Jumlah seluruh pasien instalasi obat yang disurvei
Sumber Data	Survei
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator Farmasi

## 7. Laboratorium

Judul	<b>Pemberi pelayanan laboratorium</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan laboratorium

Definisi Operasional	Pemberi pelayanan laboratorium adalah analis laboratorium yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	3 bulan sekali
Periode Analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah dan jenis tenaga yang ada di ruang laboratorium
Denominator	Jumlah dan jenis seluruh tenaga yang ada di ruang laboratorium
Sumber Data	Ruang laboratorium
Target	Tersedianya tenaga Analis
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Penanggung jawab laboratorium

Judul	<b>Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Kesalahan administrasi dalam pelayanan laboratorium meliputi kesalahan identifikasi, kesalahan registrasi, kesalahan pelabelan sampel, dan kesalahan penyerahan hasil laboratorium
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Nominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium tanpa kesalahan administrasi dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium dalam bulan tersebut
Sumber Data	Catatan di laboratorium
Target	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Koordinator laboratorium

Judul	<b>Tidak adanya kejadian tertukar spesimen</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan pasien
Tujuan	Tergambarnya ketelitian dalam pelaksanaan pengelolaan spesimen laboratorium
Definisi Operasional	Kejadian tertukar spesimen pemeriksaan laboratorium adalah tertukarnya spesimen milik orang yang satu dengan orang lain
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan dan sentinel <i>event</i>
Periode Analisa	1 bulan dan sentinel <i>event</i>
Nominator	Jumlah seluruh spesimen laboratorium yang diperiksa dikurangi dengan jumlah spesimen yang tertukar
Denominator	Jumlah seluruh spesimen laboratorium yang diperiksa
Sumber Data	Rekam medis, laporan keselamatan pasien
Target	100 %
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Koordinator Laboratorium

Judul	<b>Kelengkapan pemeriksaan laboratorium</b>
Dimensi Mutu	Efektivitas dan keselamatan
Tujuan	Tersedianya peralatan laboratorium Puskesmas sesuai standar
Definisi Operasional	Kelengkapan pemeriksaan laboratorium adalah ketersediaan peralatan di pelayanan laboratorium sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Nominator	Ketersediaan peralatan di pelayanan laboratorium
Denominator	Alat laboratorium yang harus ada di Puskesmas sesuai standar

Sumber Data	Catatan di laboratorium
Target	100%
Penanggung Jawab Pengumpulan data	Koordinator Laboratorium

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 77 SERI E



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 74 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT TENGAHTANI  
KABUPATEN CIREBON

**B. INDIKATOR SPM UKM**

**1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Judul	<b>Pelayanan kesehatan ibu hamil</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam mengakses pelayanan ibu hamil
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah pelayanan kesehatan ibu hamil yang mendapatkan kunjungan 4 kali selama periode kehamilan sesuai standar 10T di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah sasaran bumil di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Simpus dan kohort ibu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan bumil, pembuatan kantong persalinan, pelayanan antenatal, pencatatan pelaporan, Monev dan PWS
Penanggung Jawab	Koordinator KIA

**2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Judul	<b>Pelayanan kesehatan ibu bersalin</b>
Dimensi Mutu	Akses dan keterjangkauan

Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah pelayanan kesehatan ibu bersalin pada persalinan normal dan komplikasi sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan
Nominator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Semua persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Tengahtani
Sumber Data	Buku KIA
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator Persalinan

### 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	<b>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Terpeliharanya kesehatan bayi umur 0-28 hari melalui pelayanan kesehatan maupun pelayanan melalui kunjungan rumah
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah jumlah bayi usia 0-28 yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah bayi usia 0-28 yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Seluruh bayi lahir hidup di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Langkah Kegiatan	Pemantauan paska persalinan dan MTBM, pelayanan kunjungan neonatus di dalam gedung dan di luar gedung, pelayanan kunjungan neonatus, audit kesakitan dan kematian neonatus, PWS
Penanggung Jawab	Koordinator KIA

#### 4. Pelayanan Kesehatan Balita

Judul	<b>Pelayanan kesehatan balita</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Menemukan secara dini gangguan kesehatan dan kelainan tumbuh kembang yang terjadi pada balita
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan balita adalah balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kesehatan balita sehat</li> <li>b. Pelayanan kesehatan balita sakit</li> </ul>
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kumulatif balita usia 0-59 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah balita umur 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Simpus, kohort balita, buku KIA, KMS dan register MTBS
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan kompetensi kesehatan balita (MTBM, MTBS, SDIDTK) pelayanan kunjungan balita dan pra sekolah di dalam maupun di luar gedung serta pelayanan rujukan
Penanggung Jawab	koordinator KIA, Koordinator MTBM, MTBS dan Nutrisionis



## 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 sesuai standar di wilayah kerja minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu tahun sekali
Periode Analisa	Satu tahun sekali
Nominator	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan 9 di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Hasil pencatatan dan pelaporan penjarangan anak sekolah (status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan indera)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pemberian pelayanan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil penjarangan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Programer UKS

## 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Judul	<b>Pelayanan kesehatan pada usia produktif</b>
Dimensi Mutu	Kualitas dan kontinuitas
Tujuan	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Definisi operasional	Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun



Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Simpus dan hasil pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien, serta hasil kegiatan Posbindu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Skrining faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku, konseling, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Programer PTM

## 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Judul	<b>Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Melayani Usia Lanjut yang berbentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk rujukannnya
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah cakupan pengunjung usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh penduduk usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber data	Buku pedoman Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia dan buku pedoman Puskesmas Santun Lanjut Usia
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan, perencanaan kegiatan, pelayanan

## 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	<b>Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk memudahkan agar dapat dilakukan upaya promotif, preventif, dan kuratif sederhana
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi adalah Setiap penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita Hipertensi usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	PIS-PK
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Kordinator PIS-PK

## 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)

Judul	<b>Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (DM)</b>
Dimensi Mutu	Kesehatan, keselamatan
Tujuan	Sebagai acuan petugas untuk menemukan kasus baru penderita diabetes militus
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita DM adalah Cakupan jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada usia 15 tahun ke atas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun

	wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita DM berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort kunjungan penderita Diabetes Militus
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Programer PTM

#### 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	pemeriksaan untuk melihat adanya gejala awal gangguan kesehatan jiwa dengan metode 2 menit
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah Jumlah ODGJ berat di Puskesmas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah ODGJ berat di Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Kohort Kunjungan Penderita ODGJ
Target	100%
Langkah kegiatan	Penyediaan buku pedoman Keswa, pelayanan kesehatan ODGJ berat di Puskesmas, pelaksanaan kunjungan rumah, monitoring dan evaluasi.
Penanggung jawab	Programer Kesehatan jiwa

#### 11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

Judul	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</b>
-------	--



	sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis adalah jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan TB
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM TB, penyediaan KIE TB, pelayanan dan pemeriksaan TB, rujukan kasus TB, jejaring kemitraan pelayanan TB, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Programer TB

## 12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

Judul	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu minggu satu kali



	pengobatan HIV sesuai standar di Fasyankes dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan program HIV
Standar	100%
Penanggung jawab pengumpulan data	Programer HIV

### 13. Pelayanan Imunisasi

#### a. Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)

Judul	<b>Cakupan Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Mengetahui akses wilayah terhadap kelengkapan dan intensitas imunitas yang didapatkan dari sasaran bayi (0-12 bulan)
Definisi Operasional	Cakupan desa UCI adalah desa dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah desa UCI di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah desa yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber data	Simpus, kohort bayi, KMS/buku KIA serta buku catatan imunisasi
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS imunisasi dan Monev
Penanggung jawab	Koordinator imunisasi dan bidan penanggung jawab desa

#### b. Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Definisi Operasional	Cakupan IDL adalah Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (HBO 1 kali, BCG 1 kali, Polio 4 kali, DPT HB-Hib 3 kali, Campak 1 kali) di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah bayi 0-11 bulan mendapatkan imunisasi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran bayi 0-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Sumber data	Simpus, kohort bayi, KMS/buku KIA serta buku catatan imunisasi
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik, pelayanan imunisasi dan PWS imunisasi
Penanggung jawab	Koordinator imunisasi dan bidan penanggung jawab desa

### c. Cakupan BIAS Td

Judul	<b>Cakupan BIAS Td</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Pemberian imunisasi Td kepada seluruh siswa kelas 2 dan 5 SD negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat di wilayah kerja Puskesmas
Definisi Operasional	Cakupan Bias Td adalah jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 SD negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat yang mendapatkan imunisasi Td di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 SD negeri dan

	pada kurun waktu satu tahun
Denominator	jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 SD negeri dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Laporan Bias
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik
Penanggung jawab	Koordinator Imunisasi

#### **d. Cakupan BIAS DT**

Judul	<b>Cakupan BIAS DT</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan boster DT kepada anak kelas I SD sehingga menambah kekebalan anak dan terhindar dari penyakit dipteri dan tetanus maupun komplikasinya
Definisi Operasional	Cakupan BIAS DT kelas I SD adalah kegiatan imunisasi anak SD atau sederajat dengan memberikan suntik DT pada murid kelas 1 SD.
Frekuensi pengumpulan data	Satu kali satu tahun
Periode analisa	Satu kali satu tahun
Nominator	Jumlah murid kelas SD yang mendapatkan imunisasi DT di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah murid kelas I SD yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber data	Data anak SD kelas I absensi kelas
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik
Penanggung jawab	Koordinator Imunisasi

#### **e. Cakupan BIAS campak**

Judul	<b>Cakupan BIAS campak</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan boster campak kepada anak kelas 1



Definisi Operasional	Cakupan BIAS kelas 1 SD adalah kegiatan imunisasi anak SD atau sederajat dengan memberikan suntikan campak di lengan kiri pada anak SD kelas 1
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan September
Periode Analisa	Setiap bulan September
Nominator	Jumlah murid kelas 1 SD yang mendapat imunisasi campak di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah murid kelas 1 SD yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber data	Data anak SD kelas 1, absensi kelas
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS imunisasi
Penanggung jawab	Koordinator Imunisasi

#### 14. Pelayanan Penyakit Menular Lainnya

##### a. Release From Treatment (RFT) RATE MB

Judul	<b>Release From Treatment (RFT) RATE MB</b>
Dimensi Mutu	Akses, hubungan antar manusia, efisiensi
Tujuan	Untuk mengetahui jumlah penderita kusta yang telah selesai dan sembuh dari pengobatan MB
Definisi Operasional	Adalah persentase yang menunjukkan jumlah pasien atau orang yang telah menyelesaikan pengobatan MB pada kurun waktu tertentu
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Nominator	Jumlah pasien yang telah menyelesaikan pengobatan MB
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang memulai pengobatan MB pada kurun waktu yang sama
Sumber data	Programer kusta
Target	100%
Penanggung jawab	Programer Kusta



### **b. Angka Bebas Jentik**

Judul	<b>Angka Bebas Jentik</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Berkurangnya Penderita kasus DBD di wilayah kerja
Definisi Operasional	Persentase rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah rumah dan tempat umum yang diperiksa jentik dan hasilnya negatif tidak ada jentik dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik x 100 %
Sumber data	Laporan P2 DBD, SP2TP
Target	100%
Langkah kegiatan	Penegakan diagnosa, tatalaksana, monev, dan Promkes
Penanggung jawab	Koordinator P2M dan surveilans

### **c. Penemuan penderita pneumonia balita**

Judul	<b>Penemuan penderita pneumonia balita</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Balita yang menderita Pneumonia mendapatkan tatalaksana penanganan sesuai standar
Definisi Operasional	Cakupan penemuan penderita pneumonia balita adalah persentase balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Langkah kegiatan	Penemuan penderita, pengobatan, kunjungan rumah, Promkes dan Monev
Penanggung jawab	Koordinator P2M

#### **d. Penemuan Penderita Diare**

Judul	<b>Penemuan Penderita Diare</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pasien dengan diare mendapatkan tatalaksana penanganan sesuai standar sehingga tidak berakibat dehidrasi
Definisi Operasional	Pasien dengan diare yang ditangani adalah pasien dengan diare yang penanganannya sesuai dengan standar di wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penderita dengan diare yang ditangani sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh penderita diare yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber data	Laporan P2 Diare, SP2TP
Target	100%
Langkah kegiatan	Penegakan diagnosa, tatalaksana, Monev dan Promkes
Penanggung jawab	Koordinator P2M dan surveilans

#### **e. Cakupan tatalaksana kasus Filariasis**

Judul	<b>Cakupan tatalaksana kasus Filariasis</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pasien dengan filariasis mendapatkan tatalaksana penanganan sesuai standar
Definisi Operasional	Cakupan pelayanan penderita Filariasis adalah persentase kasus Filariasis yang dilakukan tatalaksana minimal 7 kali kunjungan rumah di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu satu tahun
Frekuensi	Setiap bulan

Nominator	Jumlah Kasus Filariasis yang dilakukan tatalaksana Filariasis
Denominator	Jumlah Kasus Filariasis yang ditemukan dalam 1 tahun x 100%
Sumber data	Laporan P2 Filariasis, SP2TP
Target	100%
Langkah kegiatan	Penegakan diagnosa, tatalaksana, Monev dan Promkes
Penanggung jawab	Koordinator P2M dan surveilans

### 15. Pelayanan Promosi Kesehatan

Judul	<b>Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga dengan melihat 10 indikator perilaku di rumah tangga
Definisi Operasional	Cakupan rumah tangga ber-PHBS adalah persentase rumah tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali
Nominator	jumlah rumah tangga ber-PHBS di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	jumlah seluruh rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Hasil pendataan PHBS
Target	65%
Langkah Kegiatan	Penentuan RT yang di survei, kunjungan rumah, pengkajian, analisa, tindak lanjut
Penanggung Jawab	Programer Promkes

### 16. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Judul	<b>Pengawasan rumah sehat</b>
Dimensi Mutu	Kualitas



	sarana air bersih, pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai yang tidak terbuat dari tanah (kedap air)
Definisi Operasional	Cakupan rumah sehat adalah persentase jumlah rumah sehat yang ada di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu 1 tahun
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	jumlah rumah sehat di suatu wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	jumlah rumah yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Buku catatan kegiatan di lapangan Buku kunjungan lapangan Register kesehatan lingkungan Register penyuluhan Laporan LB4 & LSDD
Target	75%
Langkah kegiatan	
Penanggung jawab	Programer Kesling

## 17. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

### a. ASI Eksklusif

Judul	<b>ASI Eksklusif</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi serta membantu melindungi dari berbagai penyakit dan infeksi agar tidak mudah sakit
Definisi Operasional	Bayi yang diberi ASI Eksklusif adalah proses pemberian ASI Eksklusif pada bayi menginjak usia 6 bulan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Nominator	Semua bayi yang memperoleh ASI Eksklusif

Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator KIA

**b. Remaja putri mendapatkan TTD**

Judul	<b>Remaja putri mendapatkan TTD</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk mencegah kematian dan komplikasi
Definisi Operasional	Persentase remaja putri mendapat TTD adalah jumlah remaja putri yang mendapat TTD secara rutin setiap minggu terhadap jumlah remaja putri yang ada dikali 100%.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah remaja putri mendapat TTD
Denominator	Jumlah seluruh remaja puteri 12-18 tahun di sekolah dikali 100 %
Sumber Data	Laporan Gizi
Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator Gizi

**c. Persentase Balita Kurus mendapat Makanan Tambahan**

Judul	<b>Persentase Balita Kurus mendapat Makanan Tambahan</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk mencegah kematian dan komplikasi
Definisi Operasional	Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan adalah jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan terhadap jumlah balita kurus dikali 100%.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan

Standar	100 %
Penanggung jawab pengumpulan data	Koordinator Gizi

## 18. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

### a. Kunjungan rawat jalan umum mendapat askep individu

Judul	<b>Kunjungan rawat jalan umum mendapat askep individu</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Membina individu rawan kesehatan
Definisi Operasional	Jumlah pasien rawat jalan dalam gedung yang mendapat asuhan keperawatan individu langsung oleh perawat
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah pasien yang mendapat asuhan keperawatan langsung oleh perawat pada rawat jalan
Denominator	Jumlah pasien yang dilakukan pengkajian, pemeriksaan fisik oleh perawat pada kunjungan rawat jalan, pelayanan gawat darurat di Puskesmas pada kurun waktu satu tahun dikali 100%
Sumber data	SP3 LB 4 R1,R2 PHN
Target	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Programer Perkesmas

### b. Cakupan Keluarga Mandiri III dan IV pada semua kasus

Judul	<b>Cakupan Keluarga Mandiri III dan IV pada semua kasus</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Membina keluarga sampai dengan 6 kali kunjungan
Definisi Operasional	Cakupan hasil akhir tingkat kemandirian Keluarga (KM III dan IV) pada keseluruhan keluarga dalam mengatasi



Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah keluarga rawan yang dibina yang memenuhi kriteria KM III dan IV di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Seluruh keluarga rawan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Sumber data	SP3 LB 4 R1 R2 PHN
Target	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Programer Perkesmas

## 19. Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut

### a. Pembinaan kesehatan gigi di masyarakat

Judul	<b>Pembinaan kesehatan gigi di masyarakat</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	pendekatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan gigi, dengan mengintegrasikan upaya promotif, preventif, kesehatan gigi pada berbagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berlandaskan pendekatan Primary Health care
Definisi Operasional	Cakupan UKBM adalah persentase UKBM yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu setahun
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	jumlah UKBM yang mendapat pembinaan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah UKBM yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

Langkah kegiatan	Pendataan, pengaturan pelayanan dan petugas, pelayanan kesehatan tingkat pertama
Penanggung jawab	Programer Kesgimul

**b. Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI**

Judul	<b>Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Pelayanan asuhan sistematis yang ditujukan bagi semua anak sekolah tingkat Pendidikan dasar dalam bentuk paket promotif, paket preventif, paket paripurna.
Definisi Operasional	Cakupan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut siswa SD adalah persentase siswa SD yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dari petugas Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah siswa SD yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut oleh petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah siswa SD yang berada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Sumber data	Catatan pembinaan yang dilakukan ke SD/MI
Target	80%
Langkah kegiatan	Pendataan, pengaturan pelayanan dan petugas, pelayanan kesehatan tingkat pertama
Penanggung jawab	Dokter gigi/Perawat gigi

**20. Pelayanan Kesehatan Kerja**

Judul	<b>Jumlah pos upaya kesehatan kerja (UKK) yang terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Pembinaan kesehatan kerja dalam pelayanan kesehatan

	penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang merupakan hak-hak dasar pekerja
Definisi Operasional	Jumlah Pos UKK yang terbentuk minimal 1 (satu) Puskesmas terbentuk 1 (satu) Pos UKK di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	1 tahun 2 kali
Periode analisa	1 tahun 2 kali
Nominator	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	1 (satu) pos UKK yang terbentuk yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%
Sumber data	Ada laporan/catatan kegiatan kesehatan kerja (Pos UKK) di Puskesmas sesuai kebutuhan lingkungan berupa Pembinaan kesehatan kerja di Pos UKK (Promotif, Preventif, Kuratif)
Target	100%
Langkah kegiatan	Pendataan, sosialisasi, perencanaan kegiatan pelayanan dan Monev
Penanggung jawab	Programer UKK

## 21. Pelayanan Kesehatan Olahraga

Judul	<b>Pembinaan kelompok olahraga</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani melalui aktifitas fisik dan atau olahraga
Definisi Operasional	Cakupan pembinaan kelompok olahraga adalah cakupan kelompok olahraga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun, yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas
Frekuensi pengumpulan data	1 tahun 2 kali
Periode analisa	1 tahun 2 kali
Nominator	Jumlah kelompok olah raga yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas



	wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Format laporan kesehatan olahraga Puskesmas
Target	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Programer Kesehatan Olahraga

## 22. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Judul	<b>Pembinaan Kelompok Tanaman Obat Keluarga (TOGA)</b>
Dimensi Mutu	Kualitas dan kuantitas
Tujuan	Membina kelompok TOGA
Definisi Operasional	Cakupan Pembinaan Kelompok TOGA adalah Cakupan Kelompok TOGA yang dibina oleh petugas Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	6 bulan sekali
Periode analisa	1 tahun sekali
Nominator	Jumlah kelompok TOGA yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas
Denominator	Jumlah kelompok TOGA yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Register Pelayanan Kesehatan Tradisional
Target	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Programer Batra

## 23. Pelayanan Kesehatan Indera

### a. Penanganan kasus kelainan refraksi

Judul	<b>Penanganan kasus kelainan refraksi</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Pemberitahuan kepada orang tua murid tentang gangguan refraksi untuk ditidakanjuti dengan pemeriksaan ulang ke dokter mata untuk diberikan

Operasional	persentase jumlah penanganan kasus dengan kelainan refraksi pada siswa kelas 5 sampai dengan 9 di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	3 bulan sekali
Periode analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah kasus kelainan refraksi yang ditangani pada siswa kelas 5 sampai dengan 9 di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah kasus kelainan refraksi yang ditemukan pada siswa kelas 5 sampai dengan 9 di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Buku catatan kelainan refraksi
Target	100%
Langkah kegiatan	Persiapan pra pelayanan, kompetensi tenaga, waktu pelayanan, rujukan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung jawab	Programer Kesehatan indera

#### **b. Penanganan penyakit katarak**

Judul	<b>Penanganan penyakit katarak</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Menangani lebih lanjut penderita katarak dengan melalui tindakan operasi
Definisi Operasional	Cakupan penanganan penyakit katarak adalah persentase jumlah penanganan penyakit katarak di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	jumlah pasien katarak yang di operasi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	jumlah pasien terdeteksi katarak di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Laporan kegiatan operasi katarak
Target	100%

Penanggung jawab	Programer Kesehatan indera
------------------	----------------------------

## 24. Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainnya (Surveilans)

### a. Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit

Judul	<b>Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Penyelenggaraan surveilans Epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan dan faktor risiko masalah penyakit menular dan tidak menular
Definisi Operasional	Cakupan kelengkapan Surveilans Terpadu Penyakit adalah cakupan kelengkapan pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan di wilayah Puskesmas dalam waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah laporan STP yang dilaporkan Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	12 bulan x 100%
Sumber data	Laporan kelengkapan/ketepatan STP Puskesmas
Target	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Surveilans

### b. Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit

Judul	<b>Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan surveilans Epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan dan faktor risiko masalah penyakit menular dan tidak menular
Definisi Operasional	Cakupan ketepatan Surveilans Terpadu Penyakit adalah cakupan ketepatan pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan di wilayah Puskesmas dalam waktu satu tahun



Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah laporan STP yang dilaporkan Puskesmas tepat waktu pada kurun waktu satu tahun
Denominator	12 bulan x 100%
Sumber data	Laporan kelengkapan/ketepatan STP Puskesmas
Target	100%
Langkah kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Surveilans

**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 77 SERI E